

Pengaruh *Islamic Human Development Index*, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022)

Natasya Anggraini¹⁾, Purbayu Budi Santosa²⁾, Putri Rizka Citaningati³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

*Email korespondensi: natasya25sep02@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the relationship between the *Islamic Human Development Index* (IHDI), Unemployment, Income Inequality, and Regency/City Minimum Wage (UMK) to Poverty in Yogyakarta Province in 2009-2022. In this study, I-HDI is calculated using the Simple Weighted Index (SWI) by using a percentage of 20 in 5 dimensions of the index adjusted to the Sharia maqashid indicator. The sample in this study was selected using the saturated sampling method. Based on the saturated sampling method, all members of the population were used as objects in this study. This study uses panel data processed using the Fixed Effect Model regression model. The regression model was used to test the relationship between 4 independent variables, namely I-HDI, Unemployment, Income Inequality, and UMK to the dependent variable, namely poverty. The results of the study show that I-HDI and UMK have a significant negative effect on poverty in Yogyakarta Province in 2009-2022. Meanwhile, the Income Inequality variable did not have a significant effect on poverty in Yogyakarta Province in 2009-2022. Meanwhile, the Unemployment variable has a significant positive effect on poverty in Yogyakarta Province in 2009-2022. However, simultaneously, all independent variables studied had an effect on poverty in Yogyakarta Province in 2009-2022.

Keywords: I-HDI, Unemployment, UMK, Poverty.

Saran sitasi: Anggraini, N., Santosa, P. B., & Citaningati, P. R. (2024). Pengaruh *Islamic Human Development Index*, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3143-3153. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>

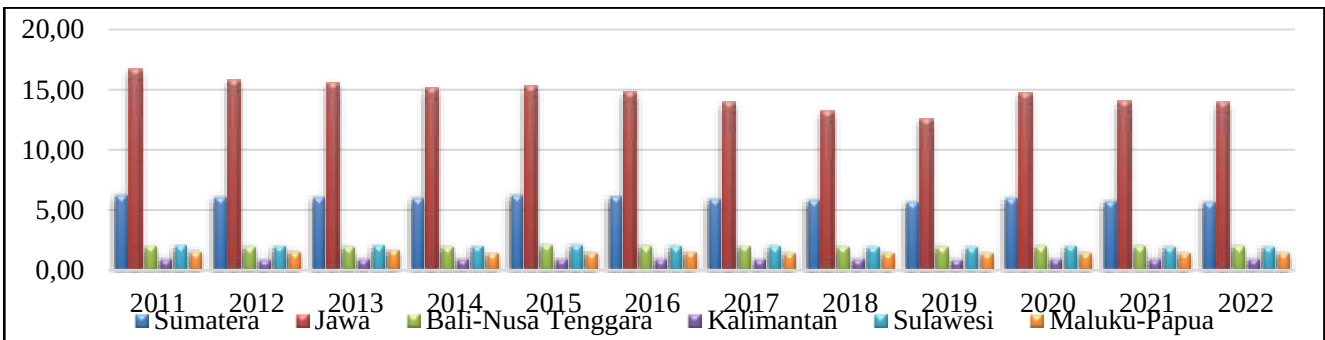
1. PENDAHULUAN

Salah satu jenis permasalahan dalam pembangunan yang sampai detik ini masih dihadapi hampir setiap negara ialah masalah kemiskinan (Jajang et al., 2021). Masalah kemiskinan ini paling banyak dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) yakni "*no poverty*" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat (Bappenas, 2023). Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan yang ada di Indonesia yakni

pengentasan kemiskinan seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum (Prasetyo & Fitanto, 2023).

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat perbandingan jumlah penduduk miskin berdasarkan beberapa pulau yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bersama bahwasannya sebagian besar penduduk miskin masih terdapat di Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin yang terdapat di Pulau Jawa berada pada jumlah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang terdapat di beberapa pulau lainnya pada tahun 2011-2022.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau di Indonesia

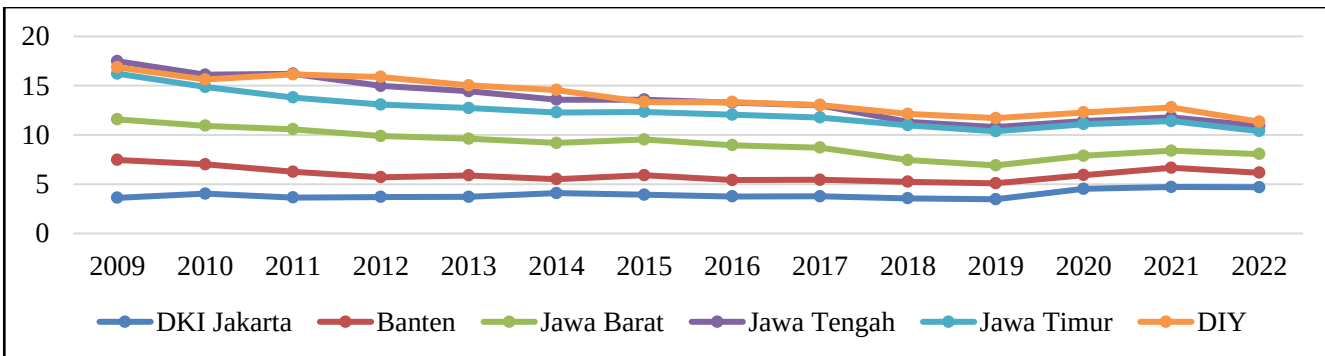


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dikarenakan jumlah penduduk miskin yang terdapat di Pulau Jawa masih tinggi, maka Gambar 2 menunjukkan perbandingan mengenai persentase penduduk miskin berdasarkan beberapa provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang telah tersaji dapat diketahui bahwasannya persentase

penduduk miskin yang terdapat di Provinsi DIY berada pada tingkat kemiskinan yang rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi lainnya yang terdapat di Pulau Jawa pada tahun 2009 hingga tahun 2022.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

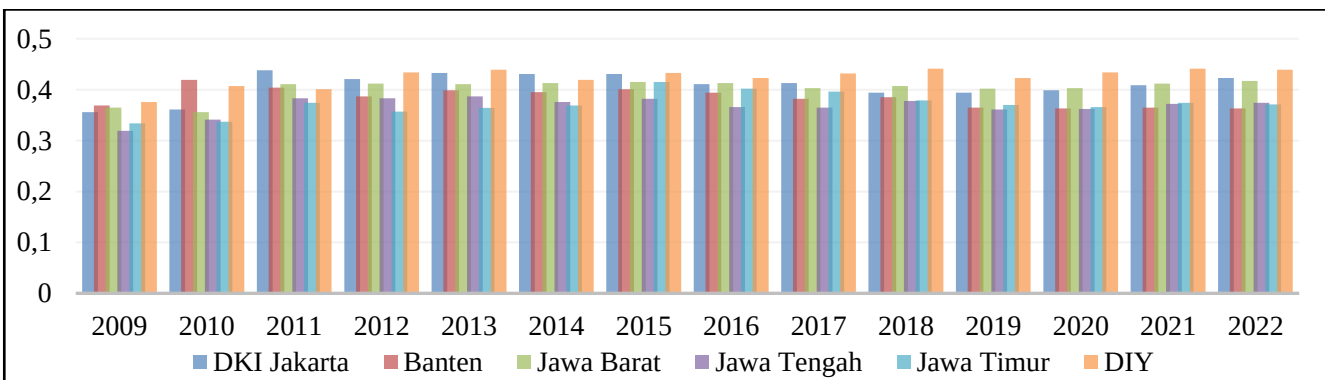


Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Permasalahan lain yang dihadapi oleh provinsi di Pulau Jawa selain kemiskinan adalah masalah ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari BPS, (2023) yang juga tersaji dalam Gambar 3, masih terdapat satu provinsi di antara 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa yang masuk ke dalam kategori provinsi dengan rasio gini tertinggi

yakni Provinsi DIY. Provinsi kedua dengan rasio gini tertinggi diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, berikutnya Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Jawa Tengah tergolong ke dalam kategori provinsi dengan rasio gini terendah di Pulau Jawa.

Gambar 3. Rasio Gini Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa



Sumber: (BPS, 2023)

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia adalah Indikator

Pembangunan Manusia (IPM). IPM awal mulanya diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. Pada saat

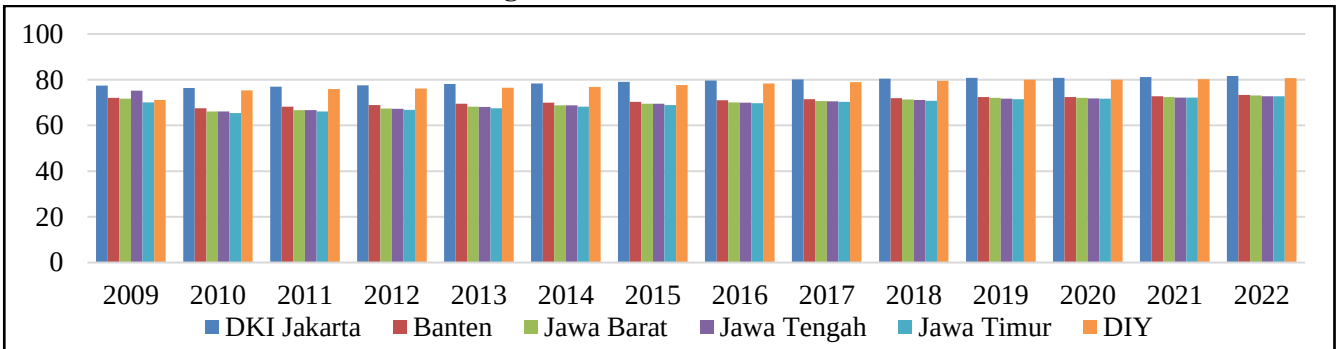
pertama kali diperkenalkan, IPM terbentuk dari empat indikator yakni: 1) angka harapan hidup saat lahir; 2) angka melek huruf; 3) gabungan angka partisipasi kasar; dan 4) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Akan tetapi, metode perhitungan dalam IPM yang dicetuskan oleh UNDP masih terus melakukan penyempurnaan (Jajang et al., 2021).

Berbagai penyempurnaan penghitungan IPM terus dilakukan oleh UNDP. Pada akhirnya, indikator untuk mengukur pembangunan manusia yang kemudian dipergunakan secara global adalah *Human Development Index* (HDI). HDI dibentuk untuk memberikan sebuah penekanan bahwasannya masyarakat dan kemampuan yang dimilikinya harus dijadikan sebagai hal utama dalam menilai pembangunan yang terdapat di sebuah negara, bukan hanya dinilai dari pertumbuhan ekonominya saja (UNDP, 2024). HDI memiliki 3 indikator utama

sebagai dasar perhitungannya yakni kesehatan yang diukur dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran pendidikan dengan menggunakan rata-rata lama sekolah bagi orang dewasa dengan usia 25 tahun ke atas, dan harapan lama sekolah bagi anak yang hendak memasuki usia sekolah. Pengukuran dimensi standar hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita (UNDP, 2024).

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat perbandingan dari IPM berdasarkan beberapa provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang tersaji dapat diketahui bahwa provinsi pertama dengan IPM tertinggi diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Provinsi DIY menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah IPM tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2009 hingga tahun 2022.

Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi DIY Tahun 2023

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	3.417.174
2	Kristen	89.538
3	Katolik	164.415
4	Hindu	3.421
5	Budha	3.062
6	Konghucu	68

Sumber: Bappeda Provinsi DIY (2024)

Jumlah penduduk berdasarkan agama di Provinsi DIY didominasi oleh penduduk beragama Islam, merupakan sebuah potensi bagi Provinsi DIY untuk dapat memanfaatkan instrumen-instrumen syariah guna membantu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pembangunan di wilayah ini. Untuk mengukur pembangunan manusia yang terdapat di suatu daerah yang kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam dirasa akan lebih memiliki kesesuaian apabila diukur dengan indikator *Islamic Human Development*

Index (I-HDI). Konsep dasar dan teori yang terdapat dalam I-HDI sudah berdasarkan maqashid syariah. I-HDI mempergunakan kerangka dari maqashid syariah yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan manusia dan menggunakan indikator maqashid syariah sebagai dasar perhitungannya (Nurhalim et al., 2022).

Menurut Fatoni et al (2019) dengan memasukkan aspek syariah dalam perhitungan pembangunan dirasa akan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terdapat di negara-negara yang termasuk ke dalam anggota OKI. Selain itu juga menjelaskan bahwa model pembangunan manusia berbasis syariah dirasa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan secara keseluruhan. Widiastuti et al (2022) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa I-HDI sebagai indikator yang dipergunakan untuk mengukur kualitas dari sumber daya manusia dapat membantu mendukung pengentasan kemiskinan di negara-negara yang termasuk ke dalam anggota OKI.

Selain itu, terdapat beberapa hal lainnya yang turut mempengaruhi kemiskinan yang terdapat di suatu daerah, salah satunya yaitu pengangguran. Pengangguran dapat diukur melalui tingkat pengangguran terbuka yang terdapat di suatu daerah. Prasetyo & Fitanto (2023) menjelaskan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya juga dilakukan oleh Pradipta & Dewi (2020), dimana disebutkan bahwasannya tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Fatoni et al. (2019) dalam penelitian yang sebelumnya telah dilakukan menyatakan bahwasannya pengangguran juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara OKI.

Kemiskinan yang terdapat di suatu wilayah juga dapat disebabkan oleh Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) yang didapat oleh para pekerja. Kebijakan upah minimum yang terdapat di suatu wilayah merupakan sebuah kebijakan yang diciptakan untuk turut membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat (Permatasari & Fitanto, 2019). Selain itu, Ghinastri & Syafitri (2024) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa upah minimum dijadikan sebagai batas minimum bagi setiap perusahaan untuk memberikan upah/gaji kepada para pekerjanya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kemiskinan akibat upah yang kecil yang tidak dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pekerja. Besaran upah yang didapat oleh para pekerja juga dapat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang terdapat di suatu wilayah. Jika upah minimum yang terdapat di suatu wilayah tinggi, maka akan menarik para pekerja untuk memperoleh pekerjaan. Hal tersebut yang kemudian dinilai dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dikarenakan kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang dapat digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel 2. Nilai Minimum dan Nilai Maksimum pada Dimensi HDI UNDP

Dimensi	Indikator	Minimum	Maksimum
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	20	85
Pendidikan	Tahun sekolah yang diharapkan	0	18
	Rata-rata tahun sekolah	0	15
Pendapatan	GNI perkapita	100	75.000

Sumber: UNDP (2020)

Pada penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, belum terdapat penelitian di Provinsi DIY yang berfokus pada penggunaan indikator *maqashid syariah* dalam HDI yang digunakannya. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang berfokus pada penggunaan indikator *maqashid syariah* dalam HDI serta menggabungkannya dengan pengangguran, ketimpangan pendapatan atau rasio gini, dan upah minimum kabupaten/kota dalam upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi DIY. Penelitian ini juga lebih terbaru mengenai rentang tahun yang digunakan yaitu 14 tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah

Imam Syathibi menyatakan bahwa tujuan dan maksud dari adanya pengaturan *syariat* (aturan hukum) adalah agar manusia bisa menghindari kemudharatan (*jalbul mashaalih wa dar'ul mafasid*) serta mencapai kemaslahatan (kemanfaatan). Maslahat menurut Al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Islamic Human Development Index (I-HDI)

Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) mengenalkan sebuah Teori yang bernama *Human Development Index* (HDI). Pembentukan HDI bertujuan untuk memberikan penekanan bahwa pembangunan yang terdapat di suatu daerah ataupun negara bukan hanya ditinjau dari perkembangan ekonominya saja, melainkan ditinjau pula dari sumber daya manusia serta kemampuan yang dimilikinya. Mengutip dari *Human Development Report* tahun 2020.

Rumus yang ditetapkan oleh UNDP guna menghitung nilai HDI yaitu sebagai berikut:

$$HDI = (I_{Health} \times I_{Education} \times I_{Income})$$

Perhitungan tiap dimensi dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Dimensi Index} = \frac{\text{nilai asli} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maximum} - \text{nilai minimum}}$$

Hasil perhitungan nilai HDI dinyatakan dalam bentuk angka dengan skala 0 hingga 1. Hasil tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk mengetahui tingkat perkembangan manusia di setiap negara. Berikut kategori HDI menurut UNDP yang tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Kategori HDI UNDP

Kategori	Nilai HDI
Sangat Tinggi	>0.8
Tinggi	0.7-0.799
Medium	0.550-0.669
Rendah	>0.550

Sumber: UNDP (2020)

Akan tetapi, HDI yang dicetuskan oleh UNDP tidak dapat mencakup aspek agama serta pandangan sosial-ekonomi dalam mengukur pembangunan yang terdapat di negara-negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Sehingga dikembangkanlah suatu teori bernama *Islamic Human Development Index* (I-HDI), yang mana telah disesuaikan melalui konsep ajaran agama Islam serta dirasa sesuai untuk diterapkan di berbagai negara Muslim maupun negara-negara non-Muslim. Beberapa peneliti juga setuju untuk menyertakan indikator yang terdapat dalam *maqashid syariah* dalam membantu mengidentifikasi kondisi pembangunan yang terdapat di sebuah negara. Model I-HDI yang digunakan dalam penelitian ini yaitu I-HDI versi Widiastuti. Dalam menghitung nilai I-HDI versi Widiastuti digunakan 5 dimensi yang sesuai dengan *maqashid syariah* yakni *din*, *nafs*, *aql*, *nasl*, dan *maal*. Langkah pertama adalah dengan menghitung indeks komposit masing-masing dimensi untuk mendapatkan skala hasil 0 sampai dengan 1 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dimensi Index} = \frac{\text{nilai asli} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maximum} - \text{nilai minimum}}$$

Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai I-HDI dengan menggunakan metode *simple weighted Index* (SWI) dengan persentase 20% pada masing-masing dimensi untuk menghasilkan hasil 100%. Berikut perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{I-HDI} = & (\% * \text{din index}) + (20\% * \text{nafs index}) + \\ & (20\% * \text{aql index}) + (20\% * \text{nasl index}) + \\ & (20\% * \text{maal index}) \end{aligned}$$

Pengangguran

Pengangguran dipahami sebagai seseorang yang notabene sudah masuk pada kategori angkatan kerja, namun ia tidak mempunyai pekerjaan serta tengah

berupaya untuk mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Pengangguran biasanya dikarenakan oleh banyaknya usia angkatan kerja tetapi tidak diimbangi dengan perluasan peluang kerja sehingga memunculkan kondisi penumpukan pencari kerja. Di samping itu, terdapat suatu kondisi dimana angkatan kerja yang tersedia cukup banyak namun nyatanya mereka tidak memenuhi tuntutan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan yang mencari pekerja. Misalnya, persyaratan mengenai jenjang pendidikan, pengalaman yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar, atau tuntutan keterampilan perkembangan teknologi yang tidak dimiliki oleh angkatan kerja. Selain itu, pengangguran juga bisa disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk dan jumlah pendatang dari luar kota sementara lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut terbatas (Diskominfo Kota Yogyakarta, 2022).

Indikator yang dipakai pada penelitian ini untuk menilai atau menakar angka pengangguran yang ada yakni dengan menggunakan persentase TPT. Banyak atau sedikitnya jumlah Pengangguran Terbuka dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah guna menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan yang baru (Diskominfo Kota Yogyakarta, 2022). Rumus TPT dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Ketimpangan Pendapatan (*Rasio Gini*)

Ketimpangan distribusi pendapatan termasuk ke dalam permasalahan utama yang terjadi dalam proses distribusi pendapatan pada suatu negara atau daerah. Ketimpangan distribusi pendapatan didefinisikan sebagai ketidaksetaraan tingkat kemakmuran ekonomi di antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Ketimpangan distribusi pendapatan bisa timbul sebab terdapatnya ketidaksetaraan mengenai sumber daya, kondisi geografis, serta faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bisa mengakibatkan meningkatnya ketimpangan antar kelompok masyarakat (kelompok miskin serta kelompok kaya) maupun ketimpangan antar wilayah (wilayah yang maju serta wilayah yang terbelakang) semakin bertambah lebar. Semakin tingginya ketimpangan yang tercipta dapat menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya kecemburuan sosial, kerentanan terhadap perpecahan wilayah, dan ketimpangan ekonomi yang semakin meluas (Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2017). Adapun, ketimpangan distribusi pendapatan yang

diteliti pada penelitian ini yakni ketimpangan distribusi pendapatan yang dikaji dari pembagian distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. Dalam hal ini, indikator ketimpangan yang digunakan yakni *Gini Ratio*.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, “Upah Minimum didefinisikan sebagai suatu upah bulanan terendah di daerah tertentu yang ditetapkan oleh gubernur daerah bersangkutan, yang mana di dalamnya terdiri dari upah pokok serta termasuk dengan tunjangan tetap”. Pada pasar tenaga kerja, besaran upah paling rendah yang harus dilunasi pelaku usaha pada pegawainya sangat penting untuk ditetapkan.

Menurut Chisti & Sakti, (2018) terdapat dua jenis upah minimum, yakni:

a. Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) dipahami sebagai upah bulanan paling rendah yang didapat dari gaji pokok bulanan beserta tunjangan tetap, yang ditujukan untuk pegawai tingkat terendah serta sudah bekerja kurang dari 1 (satu) tahun. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 mengenai Upah Minimum, “nomenklatur Upah Minimum Daerah Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Daerah Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)”.

b. Upah Minimum Sektoral (UMS)

Upah Minimum Sektoral (UMS) dipahami sebagai upah dihitung berdasarkan kemampuan suatu sektor tertentu di suatu provinsi tertentu pula. Lebih lanjut, pengaturan mengenai nomenklatur Upah Minimum Sektoral (UMS) terdapat di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 mengenai Upah Minimum, “Upah Minimum Sektor Daerah Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan upah minimum sektor daerah tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kab/Kota)”.

Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan. Pengukuran tingkat pembangunan manusia yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI). I-HDI menggunakan

kerangka dari *maqashid syariah* yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan manusia dan menggunakan indikator *maqashid syariah* sebagai dasar perhitungannya (Nurhalim et al., 2022). Menurut Fatoni et al., (2019) dengan memasukkan aspek syariah dalam perhitungan pembangunan dirasa akan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Widiastuti et al., (2022) juga menyatakan bahwa I-HDI sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dapat membantu mendukung pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota OKI. I-HDI yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini menggunakan I-HDI versi Widiastuti yang terdiri dari 5 dimensi yang sesuai dengan *maqashid syariah* yakni *din, nafs, aql, nasl, dan maal*.

H1: Islamic Human Development Index (I-HDI) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Tingkat pengangguran yang terdapat di suatu wilayah dinilai memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang berada pada wilayah tersebut. Fatoni et al., (2019) menjelaskan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka yang terdapat di suatu wilayah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Pradipta & Dewi, 2020).

H2: Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan ((Ncube et al., 2013). Menurut Fatoni et al., (2019), pemerataan pendapatan yang adil dapat mencegah kemiskinan karena hasil ekonomi tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan pentingnya peran keadilan di dalam suatu negara.

H3: Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan

Kebijakan upah minimum yang terdapat di suatu wilayah merupakan sebuah kebijakan yang diciptakan untuk turut membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat (Permatasari & Fitanto, 2019). Menurut Ghinastri & Syafitri, (2024), penetapan upah minimum bertujuan untuk menghindari terjadinya kemiskinan akibat upah yang kecil yang tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

H4: Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi DIY, laporan-laporan yang diterbitkan oleh BPS periode 2009-2022 di dalam situs resminya serta data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Fokus penelitian ini adalah kemiskinan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2009-2022. Penentuan sampel peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu dengan menggunakan metode *sampling jenuh*. Metode *sampling jenuh* merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan proses pengambilan sampel dengan metode *sampling jenuh*, maka seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi objek dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan terdiri dari *Islamic Human Development Index* (I-HDI), pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan

upah minimum kabupaten/kota. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan untuk menghitung I-HDI yakni *Simple Weighted Index* (SWI) dengan menggunakan persentase 20 pada 5 dimensi indeks yang disesuaikan dengan indikator *maqashid Syariah*, analisis regresi data panel, serta estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

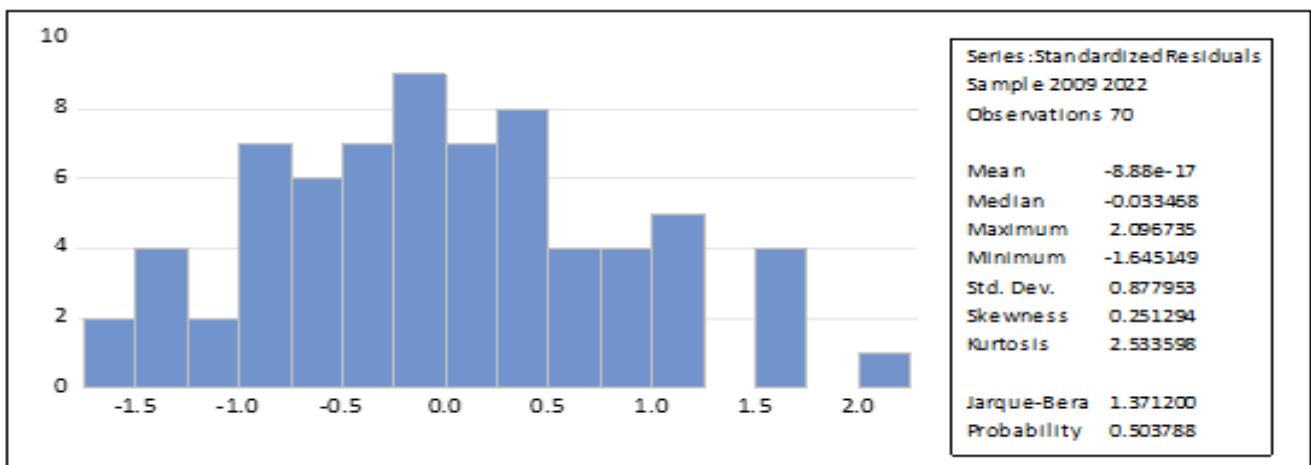
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik pada persamaan regresi yang digunakan. Deteksi asumsi klasik juga bertujuan untuk menciptakan model regresi yang tidak bias dan konsisten. Deteksi asumsi klasik yang dilakukan antara lain: deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi autokorelasi, dan deteksi heterokedastisitas.

3.1.2.



Pada gambar hasil deteksi normalitas menunjukkan bahwa nilai Prob. Jarque-Bera adalah 0.503788 yang artinya nilai Prob Jarque-Bera > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

3.1.4. Deteksi Multikolinearitas

	X1_IHDI	X2_TPT	X3_GINI	X4_UMK
X1_IHDI	1.000000	-0.198806	0.415131	0.801847
X2_TPT	-0.198806	1.000000	0.190044	-0.027769
X3_GINI	0.415131	0.190044	1.000000	0.611496
X4_UMK	0.801847	-0.027769	0.611496	1.000000

Pada hasil deteksi multikolinearitas di atas tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas. Hal tersebut dikarenakan korelasi antar seluruh variabel independen memiliki nilai korelasi di bawah 0.95, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3.1.5. Deteksi Autokorelasi

Durbin-Watson stat 1.001095

Berdasarkan hasil deteksi autokorelasi nilai Durbin-Watson stat menunjukkan angka 1.00. Nilai 1.00 tersebut berada di antara nilai +2 hingga -2

sehingga dapat disimpulkan tidak mengalami gejala autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi.

3.1.6. Deteksi Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.206308	0.580293	0.355524	0.7234
X1_IHDI	-0.524072	0.723882	-0.723973	0.4718
X2_TPT	0.095691	0.055220	1.732893	0.0882
X3_GINI	0.359551	1.557661	0.230827	0.8182
X4_UMK	1.70E-07	2.77E-07	0.611663	0.5430

Pada hasil deteksi heterokedastisitas di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. pada setiap variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 (> 0.05) artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

3.1.7. Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.28841	1.096131	15.77221	0.0000
X1_IHDI	-4.025813	1.367360	-2.944223	0.0046
X2_TPT	0.311869	0.104307	2.989923	0.0040
X3_GINI	4.105377	2.942307	1.395292	0.1680
X4_UMK	-2.85E-06	5.24E-07	-5.438906	0.0000

Berdasarkan hasil uji statistik t adalah sebagai berikut:

- Variabel I-HDI (X1) memiliki p-value $0.0046 < 0.05$ yang berarti variabel I-HDI (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y).
- Variabel pengangguran (X2) memiliki p-value $0.0040 < 0.05$ yang berarti variabel pengangguran (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y).
- Variabel ketimpangan pendapatan (X3) memiliki p-value $0.1680 > 0.05$ yang berarti variabel ketimpangan pendapatan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).
- Variabel UMK (X4) memiliki p-value $0.0000 < 0.05$ yang berarti variabel UMK (X4) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).

3.1.8. Uji F (Uji Koefisien Regresi Bersama)

F-statistic	297.5887
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel diperoleh Prob. (F-statistic) sebesar 0.000000 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 (< 0.05). Artinya seluruh variabel independen pada penelitian ini yaitu, I-HDI, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan UMK secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2009-2022.

3.1.9. Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

R-squared	0.975018
Adjusted R-squared	0.971741

Berdasarkan tabel diperoleh hasil koefisien determinan (R^2) sebesar 0.975018 (97,5%). Hal tersebut berarti bahwa kontribusi yang diberikan oleh I-HDI, pengangguran, ketimpangan pendapatan, UMK terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2009-2022 adalah sebesar 97,5% sedangkan sisanya 2,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Human Development Index* berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Widiastuti et al., 2022), Viollani et al., (2022), Utami & Santosa, (2024) dan (Nurlayli & Jumarni, 2022). Hasil regresi pada variabel independen X1 yakni I-HDI memperlihatkan nilai probabilitas 0,00 dengan nilai t-stat sebesar -2,94. Nilai t-stat yang menunjukkan angka negatif yakni -2,94 menyatakan bahwa I-HDI memiliki pengaruh yang negatif atau dengan kata lain setiap kenaikan I-HDI sebesar 1 satuan maka dapat memberikan penurunan 29,4 satuan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Perihal tersebut memperlihatkan jika semakin tinggi nilai I-HDI maka tingkat kemiskinan akan semakin turun. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga membuktikan Teori Pembangunan Islam. Pada model pembangunan Islam yang telah dirumuskan oleh Umer Chapra, sumber daya insani (*Human Beings*) merupakan salah satu titik berat kesejahteraan. Manusia dijadikan sebagai tujuan sekaligus alat pembangunan. Tujuan dari sebuah pembangunan, maka kemakmuran tentunya ditargetkan bagi manusia. Saat kesejahteraan manusia sudah tercukupi maka manusia nantinya bisa bekerja dengan efektif dan baik. Sementara sebagai alat pembangunan, manusia ialah subjek yang bekerja bagi proses pembangunan tersebut.

3.2.2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009-2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Fitanto, (2023), Pradipta & Dewi, (2020), dan Fatoni et al.,

(2019). Hasil regresi pada variabel independen X2 yakni Tingkat Pengangguran Terbuka memperlihatkan nilai probabilitas 0,00 dengan nilai t-stat yakni 2,98. Nilai t-stat yang menunjukkan angka positif yakni 2,98 membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif atau dengan kata lain setiap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 1 satuan juga dapat meningkatkan 29,8 satuan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Perihal ini berarti jika semakin tinggi angka pengangguran maka tingkat kemiskinan juga akan semakin tinggi.

3.2.3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan atau *rasio gini* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan pada penelitian yang terdahulu yang dilaksanakan (Putra et al., 2021), (Anggoro, 2024), (Nina & Rustariyuni, 2018), dan Dewi, (2022) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) tidak mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Hasil regresi pada variabel independen X3 yakni Rasio Gini memperlihatkan nilai probabilitas 0,16 dengan nilai t-stat yakni 1,39. Nilai t-stat yang menunjukkan angka positif yakni 1,39, membuktikan bahwa Rasio Gini berpengaruh positif atau dikatakan setiap kenaikan Rasio Gini sebesar 1 satuan maka akan turut menaikkan 13,9 satuan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan dari Rasio Gini atas kemiskinan di Provinsi DIY juga dapat dikarenakan pendapatan masyarakat di Provinsi DIY kebanyakan merata, nilai ketimpangan pada Provinsi DIY rata-rata ada di angka 0.36-0.49, dimana angka tersebut termasuk ke dalam ketimpangan sedang. Selain itu, masyarakat di Provinsi DIY memiliki mata pencaharian yang cenderung homogen yakni pertanian, pedagang, dan pengrajin yang menyebabkan masyarakat di Provinsi DIY memiliki distribusi pendapatan yang hampir sama sehingga Rasio Gini kurang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Mayoritas mata pencaharian masyarakat DIY sebagai pedagang dan pengrajin dikarenakan budaya di Provinsi DIY masih sangat kental sehingga banyak tempat wisata kebudayaan dan sering diadakan berbagai acara kebudayaan.

3.2.4. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Utami & Masjkuri, (2018), Permatasari & Fitanto, (2019), dan Ghinastri & Syafitri, (2024). Hasil regresi dalam variabel independen X4 yakni UMK menunjukkan nilai probabilitas 0,00 dengan nilai t-stat yakni -5,43. Nilai t-stat yang menunjukkan angka negatif yakni -5,43, membuktikan bahwa UMK berpengaruh negatif dikatakan setiap kenaikan UMK sebesar 1 satuan maka dapat memberikan penurunan 54,3 satuan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai pengaruh *Islamic Human Development Index* terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa IHDI memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi nilai IHDI maka kemiskinan di Provinsi DIY akan semakin mengalami penurunan karena pembangunan manusia di wilayah tersebut baik. Selanjutnya hasil analisis mengenai pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena seseorang yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan yang pada selanjutnya akan memberikan pengurangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan terjebak dalam kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan atau *rasio gini* pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan masyarakat di Provinsi DIY kebanyakan merata, nilai ketimpangan pada Provinsi DIY rata-rata ada di angka 0.36-0.49, dimana angka tersebut termasuk ke dalam ketimpangan sedang. Selain itu, masyarakat di Provinsi DIY memiliki mata pencaharian yang cenderung homogen yakni pertanian, pedagang, dan pengrajin yang menyebabkan masyarakat di Provinsi DIY memiliki distribusi pendapatan yang hampir sama sehingga Rasio Gini kurang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Terakhir, hasil analisis mengenai pengaruh UMK terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena semakin

banyak besaran UMK yang diterima oleh para pekerja maka kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan akan mengalami penurunan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga terselesaikannya penelitian ini.

6. REFERENSI

- Affandi, A., & Astuti, D. P. (2014). Dynamic Model of Ibnu Khaldun Theory on Poverty: Empirical Analysis on Poverty in Majority and Minority Muslim Populations After The Financial Crisis. *Humanomics*, 30(2), 136–161. <https://doi.org/10.1108/H-05-2012-0010>
- Akbar, A. A. A. (2019). Pengaruh Dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 7(2), 1–21.
- Amalia, F., Sinaga, R., Asyari, Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litriani, E., & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Profil Kemiskinan di Indonesia 2011*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2022-2023*.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY. (2017). *Analisis Ketimpangan Pengeluaran Penduduk (Indeks Gini) Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2016*.
- Bappeda Provinsi DIY. (2024). *Jumlah Pemeluk Agama di Provinsi DIY*.
- Bappeda Provinsi DIY. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota*.
- Bappenas. (2023). *Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. In *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (pp. 1–52).
- BPS. (2023). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2024*.
- BPS Bantul. (2024). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul*.
- BPS Gunungkidul. (2024). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul*.
- BPS Kulon Progo. (2024). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo*.
- BPS Provinsi DIY. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan), 2022-2024*.
- BPS Provinsi DIY. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2022-2024*.
- BPS Provinsi DIY. (2024). *Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta (Rupiah/Bulan), 2022-2024*.
- BPS Provinsi DIY dan Bappeda DIY. (2020). *Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*.
- Chisti, N. S. K., & Sakti, R. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 6(2), 1–13.
- Devanantyo, N. U. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 9(2), 1–24.
- Dewantari, N. N. A. B., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Independen: Journal Of Economics*, 1(1), 120–135. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independen>
- Diskominfo Kota Yogyakarta. (2022). *Analisis Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2021*.
- Fatoni, A., Herman, S., & Abdullah, A. (2019). Ibnu Khaldun Model On Poverty: The Case of Organization of Islamic Conference (OIC) Countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 341–366.
- Ghinastri, S. L., & Syafitri, W. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83.
- Jajang, A., Mahri, W., Cupian, Nur, M., Al Arif, R., Arundina, T., & Widiastuti, T. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Lindrianti, N. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana dari Pusat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 46–56.
- Maulana, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengangguran, Pendidikan, Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Daerah Pedesaan (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2005-2015). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 6(2), 1–19.
- Ncube, M., Anyanwu, J., & Hausken, K. (2013). Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). In *African Development Bank Group*. www.afdb.org/

- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nurhalim, A., Mawani, L., & Fitri, R. (2022). Pengaruh Zakat dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020. *AL-MUZARA'AH*, 10(2), 185–196. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>
- Nurlayli, S., & Jumarni. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 114–130.
- Pemkot Kota Yogyakarta. (2021). *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020*.
- Permatasari, V. B. D., & Fitanto, B. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 7(2), 1–19.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (2024). *Human Development Index (HDI)*.
- Utami, F., & Santosa, P. B. (2024). The Nexus Between Islamic Human Development Index (I-HDI), Islamic Social Finance, Governance, and Poverty: A Case Study in ASEAN. *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1).
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 28(2), 105–116. <https://doi.org/10.20473/jeba.V28I22018.5822>
- Viollani, K. A., Siswanto, & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh *Islamic Human Development Index* dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5233–5244. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- WHO. (2024). *Population Below The International Poverty Line*.
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The Nexus Between Islamic Social Finance, Quality of Human Resource, Governance, and Poverty. *Heliyon*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11885>
- World Bank. (2024). *Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Lines*.
- Yulianto, T. (2023). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*.